

## EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN USAHA PROGRAM GERBANGMAS-TASKIN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN PADA UNIT PELAKSANA KEUANGAN (UPK) DI KOTA BANJARBARU

Muhammad Muthahhari Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Email : [muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id](mailto:muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id)

### ABSTRACT

*The South Kalimantan Community Development Integrated Movement for Poverty Alleviation has been implemented by the Human and Environmental Empowerment Activity unit carried out by the Implementing Team (Timlak) in the form of grant assistance. The results can be directly felt by the target households of the program. However, in the implementation of business empowerment, it is known that every Financial Implementing Unit (UPK) in Banjarbaru City faces almost the same problem, namely the inability to repay loans (arrears) every month by program recipient households. This research was conducted using a descriptive evaluative research approach. In practice, this research is intended to evaluate the effectiveness of business empowerment of the Gatemas Taskin Program in Banjarbaru City in business development and increasing the income of poor households as potential program targets. The results showed that the implementation of the Integrated Community Development Movement Program (Gerbangmas-Taskin) for Poverty Alleviation in Banjarbaru City, was considered ineffective in helping business development and increasing the income of poor households. This is because the program recipients are not households that meet the target household criteria (RTS), namely poor households (RTM) who receive direct cash subsidies so that the program targets to help the poor develop businesses and increase their income cannot be achieved or are not on target. This fact shows that the Gerbangmas Taskin Program has not implemented microfinance principles, one of which is that aid is only for the poor. Factors causing the program's ineffectiveness are non-poor household beneficiaries (contrary to microfinance principles), lack of understanding of UPK programs, low participation, and suboptimal assistance.*

**Keywords:** *Gatemas Taskin, Financial Implementing Unit, City of Banjarbaru, Effectiveness.*

### ABSTRAK

Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan oleh unit Kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan yang dilaksanakan Tim Pelaksana (Timlak) dalam bentuk bantuan hibah. Hasilnya langsung dapat dirasakan rumah tangga sasaran program. Tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha, diketahui bahwa pada setiap Unit Pelaksana Keuangan (UPK) di Kota Banjarbaru menghadapi permasalahan yang hampir sama yaitu ketidaklancaran tahap pengembalian pinjaman (tunggakan) setiap bulan oleh rumah tangga penerima program. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif evaluatif. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi mengenai efektifitas pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin berpotensi sebagai sasaran program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat (Gerbangmas-Taskin) Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru, dinilai belum efektif dalam membantu pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Hal tersebut disebabkan karena penerima program bukan termasuk rumah tangga yang memenuhi kriteria rumah tangga sasaran (RTS) yaitu rumah tangga miskin (RTM) yang menerima subsidi langsung tunai sehingga sasaran program untuk membantu kelompok miskin mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya tidak dapat dicapai atau tidak tepat sasaran. Fakta ini menunjukan bahwa Program Gerbangmas Taskin, belum menerapkan prinsip-prinsip microfinance yang salah

satunya adalah bahwa bantuan hanya untuk orang miskin. Faktor penyebab belum efektifnya program adalah penerima program bukan rumah tangga miskin (bertentangan dengan prinsip microfinance), kurangnya pemahaman UPK terhadap program, partisipasi yang masih rendah, dan pendampingan yang tidak optimal.

**Kata Kunci: Gerbangmas Taskin, Unit Pelaksana Keuangan, Kota Banjarbaru, Efektivitas**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penduduk miskin Kalimantan Selatan sebanyak 175.977 orang tersebar di 13 kabupaten dan kota. Sebanyak 19.603 jiwa atau 11,7 % atau setara 7.040 rumah tangga miskin diantaranya bermukim di wilayah Kota Banjarbaru. Penduduk Banjarbaru menurut data statistik yang dikeluarkan BPS Kota Banjarbaru tahun 2018 berjumlah 171.496 orang terdiri 86.270 laki-laki, 85.226 perempuan.

Permasalahan kemiskinan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karenanya pemerintah daerah dituntut memiliki strategi kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Kemiskinan penduduk menjadi tantangan terbesar pembangunan daerah dan merupakan indikator keberhasilan atau kegagalan bagi kepala daerah yang wilayahnya diketahui memiliki potensi sumberdaya alam.

Merujuk ungkapan Sarman (2008), bahwa walaupun kemiskinan banyak disebabkan faktor kultural, beberapa kajian membuktikan bahwa faktor dominan penyebab kemiskinan di Kalimantan Selatan adalah faktor struktural. Ciri kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena sebab latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang tidak cukup handal untuk mencukupi kebutuhan hidup. Untuk itu, pemecahan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan seharusnya tidak hanya memberikan akses untuk berusaha bagi kelompok miskin, tetapi juga melibatkan kelompok miskin tersebut sebagai subyek program pemberdayaan.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan lain-lain. Banyaknya program-program pemberdayaan tidak serta merta menyelesaikan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut tidak berkurang, bahkan

cenderung meningkat, walaupun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan lain-lain. Banyaknya program-program pemberdayaan tidak serta merta menyelesaikan masalah kemiskinan di Kalimantan Selatan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat, walaupun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan.

Konsep Program Gerbangmas Taskin di Kalimantan Selatan merupakan model program pengentasan kemiskinan yang meniru keberhasilan pelaksanaan Program Gerdu Taskin yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program Gerdu Taskin yang bersifat sederhana dan menyentuh pada kebutuhan penduduk miskin, menjadikan program ini mendapat dukungan luas di masyarakat. Dalam perkembangannya Program Gerdu Taskin ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Program Gerbangmas Taskin yang berorientasi pada pelaksanaan Tridaya telah diberikan dan dimanfaatkan kelompok sasaran yaitu rumah tangga miskin. Pemberdayaan manusia dilaksanakan dengan konsep bantuan hibah berupa paket pendidikan, makanan bergizi, sembilan bahan pokok (sembako). Pemberdayaan lingkungan dilaksanakan dalam bentuk bantuan hibah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lingkungan, seperti drainase, jalan, MCK, sumur resapan dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan usaha dilaksanakan dengan konsep dana bergulir berbentuk pinjaman modal pengembangan usaha melalui kelompok masyarakat (Pokmas).

Program Gerbangmas Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pendekatan yang didasarkan pada konsep Tridaya meliputi, pertama, pemberdayaan manusia, pendekatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perbaikan tempat tinggal dengan sasaran memberdayakan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTMR), kedua, pemberdayaan lingkungan, bertujuan menyediakan dan meningkatkan fasilitas umum dan pengembangan prasarana/sarana ekonomi

masyarakat, ketiga, pemberdayaan usaha bertujuan pengembangan usaha untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dengan sasaran Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) (Pedoman Umum Program Gerbangmas Taskin Tahun 2018).

Kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan yang dilaksanakan Tim Pelaksana (Timlak) dalam bentuk bantuan hibah, hasilnya langsung dapat dirasakan rumah tangga sasaran program. Tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha, diketahui bahwa pada setiap Unit Pelaksana Keuangan (UPK) di Kota Banjarbaru menghadapi permasalahan yang hampir sama yaitu ketidاكلancaran tahap pengembalian pinjaman (tunggakan) setiap bulan oleh rumah tangga penerima program.

Oleh karena itu, pokok permasalahan yang hendak dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah mengenai efektifitas pemberdayaan usaha yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) untuk mengembangkan usaha ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin terutama di Kota Banjarbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan penduduk adalah tantangan terbesar pembangunan nasional dan merupakan indikator keberhasilan (atau kegagalan) bagi kepala daerah yang wilayahnya diketahui memiliki potensi sumberdaya alam yang seyogyanya mampu memberikan kemakmuran bagi penduduk di daerah tersebut. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang diketahui memiliki sumberdaya alam yang berlimpah dan mestinya dapat memberikan kemakmuran bagi penduduknya. Dengan logika semacam itu kemudian dianggap sebagai sebuah ironi apabila suatu daerah yang berlimpah sumberdaya alamnya justru penduduknya banyak yang miskin (Sarman, 2008).

Strategi penanggulangan kemiskinan akan dapat diimplementasikan dengan optimal manakala perumus kebijakan memiliki pemahaman bagaimana kemiskinan terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh si miskin. Art & Brown dalam Sarman (2008), menilai bahwa kemiskinan menurut Bank Dunia harus dipahami sebagai suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik atau sosial. Kekurangan fisik meliputi ketidakcukupan dalam kebutuhan dasar materi dan biologis (basic material and biological needs), termasuk

kekurangan dalam nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Sedangkan ketidakcukupan sosial meliputi hal-hal yang lebih luas, yaitu kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan inspirasi

### **Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru**

Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin dengan pendekatan Tridaya, dalam landasan gerak operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi, keswadayaan, transparan dan akuntabel, keterpaduan, otonomi dan desentralisasi, peran perempuan dan keberlanjutan. Secara konseptual prinsip-prinsip program tersebut di atas hakikatnya berusaha mencapai tujuan sebagaimana konsep Korten yang fokus pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan sumber kekuatan, kesempatan, dan kekuasaan individu, kelompok sasaran lokal, masyarakat serta struktur kelembagaan pembangunan (capacity, capability, and institutional locally), agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip partisipasi hakikatnya adalah pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pelestarian, secara optimal dilaksanakan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin itu sendiri, artinya bahwa kelompok miskin menjadi subyek bukan obyek program, sarana untuk berpartisipasi cukup terbuka dan mampu mengurangi hambatan pribadi seperti kurang percaya diri, ketidakberdayaan dan lain-lain.

Prinsip keswadayaan berusaha mengembangkan program dengan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan seoptimal mungkin dilaksanakan dengan mendayagunakan potensi dan kemampuan lokal. Sedangkan prinsip keterpaduan dan keberlanjutan menyangkut pengembangan program secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, pengusaha, LSM, perguruan tinggi dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis, yang mana pada akhirnya mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kegiatan.

### **Konteks Pemberdayaan Masyarakat**

Program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah diakui menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagai tolok ukur keberhasilan program. Walaupun ukuran pemberdayaan memiliki tingkatan, namun kinerja suatu program dapat

diukur dari sejauh mana sasaran program dicapai dan manfaat yang dirasakan sasaran program. Pemahaman tentang hakikat pemberdayaan (empowerment) akan memberikan kemampuan untuk menilai setiap program pemberdayaan, apakah telah memenuhi prinsip pemberdayaan atau tidak.

Pemahaman pemberdayaan yang di sampaikan Payne dalam Adi (2008) pada intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya dalam rangka mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Sehingga dalam konteks kesejahteraan sosial, Biestek dalam Adi (2008) memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk “self determination”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan masyarakat selain dapat dilihat dari berbagai aspek, juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Program Gerbangmas Taskin yang diluncurkan sejak 2007 diharapkan semakin lama akan memberikan pengaruh pada kemandirian dari kelompok sasaran, dan lembaga pengelola program di tingkat desa atau kelurahan siap untuk proses perubahan menuju terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak lagi tergantung pada bantuan pemerintah, namun menjadi unit usaha yang mandiri yang dimiliki oleh desa atau kelurahan.

### **Konteks Partisipasi**

Merujuk pada Ife dan Tesoriero (2008), secara konseptual dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi. Tujuannya adalah membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat, serta menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu.

Merujuk pada Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pembangunan, pertama, partisipasi masyarakat

merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sifat masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dengan demikian secara konseptual, partisipasi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor meliputi faktor sosial ekonomi, faktor fisik dan faktor nilai budaya. Faktor sosial ekonomi meliputi pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, komunikasi, kesadaran politik. Faktor fisik meliputi lokasi keterjangkauan, sarana dan prasarana, wilayah/geografi, penduduk, institusi, sedang faktor budaya meliputi persepsi, sikap, pengetahuan, kepercayaan.

Jadi dalam program pemberdayaan masyarakat, ruang bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program untuk berpartisipasi mestinya terbuka, sehingga hambatan pribadi yang mereka miliki seperti tidak percaya diri, ketidakberdayaan dan lain-lain dapat mereka atasi. Kelompok sasaran sedapat mungkin ikut terlibat pada setiap keputusan yang diambil.

### **Konsep Efektivitas Program**

Sebagai sebuah model pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi penduduk miskin, Program Gerbangmas Taskin dapat dipandang sebagai sebuah program pemberdayaan atau dalam konteks yang lebih luas sebagai program pembangunan. Setiap program pemberdayaan memiliki tujuan masing-masing dan telah ditetapkan disaat program dirumuskan.

Keberhasilan atau kegagalan suatu program pemberdayaan merupakan gambaran tentang sejauhmana tujuan telah dicapai (efektif atau tidak), dan hal ini dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu pertama, mereka yang dibantu (sasaran); kedua, program; dan ketiga, organisasi yang membantu. Diasumsikan dengan menekankan pada kebutuhan kelompok sasaran akan menjadikan mereka mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab terhadap program (sense of responsibility).

Sepaham dengan konsepsi yang dikemukakan Korten, Program Gerbangmas Taskin pun diperkirakan dapat menggunakan model analisis tersebut untuk menilai efektifitas program dalam memberdayakan kelompok miskin penerima bantuan program. Model interaksi antara

masyarakat kelompok sasaran, program pembangunan, dan organisasi pelaksana yang disebut sebagai “kesesuaian tiga arah” merupakan gambaran daya kerja suatu program yang meliputi fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu (beneficiaries), program pembangunan, dan organisasi yang membantu. Dengan kata lain, program pembangunan akan berhasil atau gagal memajukan kesejahteraan kelompok sasaran masyarakat, tergantung pada kualitas derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pembantu.

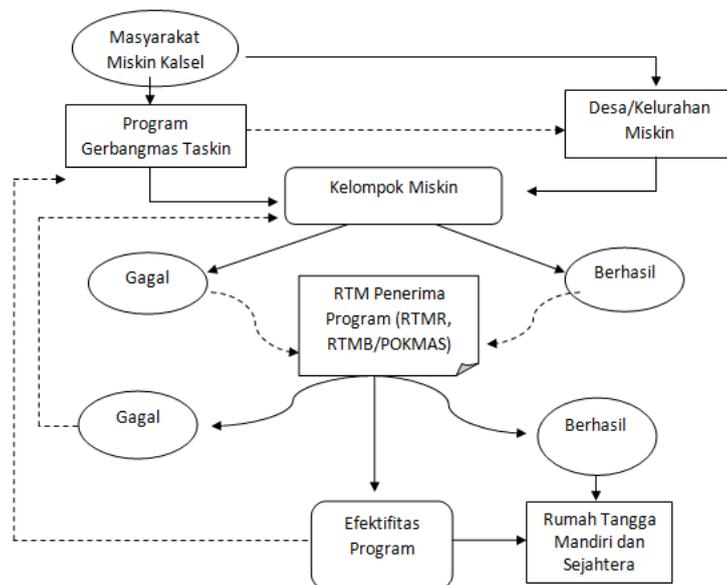
## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif evaluatif. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi mengenai efektifitas pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin berpotensi sebagai sasaran program.

Data primer penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen utama penelitian, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada kelompok penerima program secara informal dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. selain itu adapula hasil pengamatan (observasi) berdasarkan pedoman observasi tentang perilaku dan kondisi fisik (rumah tinggal, tempat usaha, lingkungan) kelompok sasaran untuk mendukung hasil kegiatan wawancara.

Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Laporan UPK, Laporan Pendamping Program, Laporan Sekretariat Tetap Program (Laporan Pelaksanaan Program), Pedoman Umum Program Gerbangmas Taskin dan dokumen-dokumen pelaksanaan program lainnya. Penelitian ini bermaksud menilai program dan ingin mengetahui faktor penentu keberhasilan atau faktor penyebab kegagalan.

Gambar Model Alur Pikir Evaluasi Program



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru

Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru secara langsung dikordinasikan oleh Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan surat keputusan walikota. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK Kota Banjarbaru dalam mengembangkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banjarbaru yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarbaru. Secara fungsional TKPK Kota Banjarbaru dikordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru.

Dalam tataran kebijakan pengentasan kemiskinan, di Kota Banjarbaru, TKPK memiliki peran kordinatif. Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan seperti program Jamkesmas, Jamkesda, PNPM Mandiri, BLT, Raskin dan lain-lain termasuk Program Gerbangmas Taskin.

Pada setiap kelurahan penerima program dibentuk organisasi pengelola program yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala kelurahan. UPK di Kota Banjarbaru telah dibentuk 20 unit di setiap kelurahan. UPK sekurang-kurangnya terdiri dari

Pelaksanaan pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan dilakukan oleh Tim Pelaksana (Timlak) Kelurahan yang dibentuk oleh kepala kelurahan melalui musyawarah desa dan sedapat mungkin melibatkan LKMD dan Timlak. Tugas dan tanggungjawab Timlak meliputi pembuatan rencana kerja teknis kegiatan dan RAB, membahas rencana kegiatan bersama UPK, pihak kelurahan dan wakil RTM sasaran program, melaksanakan kegiatan, melaporkan kegiatan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif kepada UPK.

Untuk penerima program pemberdayaan usaha pada kelompok usaha, dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) usaha ekonomi produktif atau Pokmas UEP. Pokmas merupakan himpunan dari beberapa RTM Berpotensi yang bersepakat untuk memperoleh pinjaman dari UPK sesuai kebutuhan. Tugas dan tanggungjawab pokmas adalah membuat dan menyepakati aturan kelompok, melaksanakan kesepakatan dengan UPK berkaitan dengan ketentuan pinjaman, bertanggungjawab secara “tanggung renteng” terhadap pengembalian pinjaman sesuai akad pinjaman, mencatat kegiatan dan keuangan kelompok, berkordinasi dan melaporkan perkembangan kegiatan ke UPK. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat yang berhasil dibentuk di Kota Banjarbaru berjumlah 179 pokmas yang keanggotaannya didominasi oleh perempuan (59,9%) dari 796 penerima program seperti tabel dibawah ini:

**Tabel . Daftar Pokmas Program Gerbangmas Taskin**

No	Kecamatan	Jumlah Pokmas	Jenis Kelamin Penerima Program		Jumlah	Ket
			Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banjarbaru Utara	36	61	75	136	
2.	Banjarbaru Selatan	34	62	86	148	
3.	Liang Anggang	24	128	48	176	
4.	Cempaka	29	62	109	171	
5.	Landasan Ulin	56	6	159	165	
	Banjarbaru	179	319(40,1%)	477(59,9%)	796	

Sumber : *Diolah dari Laporan Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru. 2019*

**Tabel Kelurahan Penerima dan Jumlah Dana Program Gerbangmas Taskin Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana (Rp) (000)	Jumlah	Ket
-----	-----------	-----------	---------------------------	--------	-----

			Prov.	Kota		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cempaka	Palam Sei Tiung Cempaka Bangkal	- - - -	60.000 60.000 60.000 60.000	60.000 60.000 60.000 60.000	Mandiri Mandiri Mandiri Mandiri
2.	Landasan Ulin	Syamsuddin Noor Landasan Ulin Timur Guntung Manggis Guntung Payung	50.000 - - -	45.000 60.000 60.000 60.000	95.000 60.000 60.000 60.000	Sharing Mandiri Mandiri Mandiri
3.	Banjarbaru Selatan	Sungai Besar Guntung Paikat Loktabat Selatan	50.000	45.000 60.000 60.000	95.000 60.000 60.000	Sharing Mandiri Mandiri
4.	Banjarbaru Utara	Sungai Ulin Mentaos Loktabat Utara	50.000	45.000 60.000 60.000	95.000 60.000 60.000	Sharing Mandiri Mandiri
5.	Liang Anggang	Land. Ulin Utara Land. Ulin Tengah Land. Ulin Selatan	50.000	45.000 60.000 60.000	95.000 60.000 60.000	Sharing Mandiri Mandiri
	Jlh Total	17 Kelurahan	200.000	960.000	1.160.000	

Sumber : *Diolah dari Laporan Program Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru. 2019*

### Konteks Pemberdayaan Manusia

Tujuan kegiatan pemberdayaan manusia Program Gerbangmas Taskin di wilayah Kota Banjarbaru adalah memberikan pelayanan kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan dan pengurangan beban bagi keluarga miskin rentan (RTMR) melalui bantuan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

Sampai 2010, total dana yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan manusia di Kota Banjarbaru mencapai Rp 333.120 000,- dengan penerima manfaat rumah tangga miskin sebanyak 1.655 rumah tangga. Dengan asumsi 1 rumah tangga memiliki 3 anggota keluarga, maka penerima manfaat program diperkirakan sebanyak 4.965 jiwa.

Pemberdayaan manusia dilaksanakan oleh Tim Pelaksana (Timlak) berdasarkan lembar kerja kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara pemberian bantuan kepada RTMR dengan beberapa jenis bantuan, yaitu, paket pendidikan (peralatan sekolah, tas, buku), paket makanan bergizi, paket sembilan bahan pokok ( gula, minyak goreng, mie, susu), rehabilitasi ringan rumah bagi sasaran program.

Berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan manusia, hasil observasi dan wawancara dengan sepuluh kepala rumah tangga yang mendapatkan bantuan, diperoleh informasi sebagai berikut :

a. Rumah tangga yang mendapatkan bantuan diketahui tidak tergolong rumah tangga yang benar-benar miskin (absolute), namun termasuk rumah tangga yang secara relative dikatakan miskin, artinya dibandingkan disekitarnya rumah tangga termasuk tergolong paling miskin. Gambaran umum dari sepuluh responden penerima program yang dijadikan informan, fakta menunjukkan bahwa hanya dua kepala keluarga yang tidak bekerja disebabkan usia (tua), dan beban hidupnya ditanggung anak-anaknya, sedang delapan lainnya memiliki pekerjaan tetap seperti tukang batu, bengkel, penjual sayur, penjual krupuk, karyawan swasta dan PNS. Rumah yang menjadi tempat tinggal adalah bangunan semi permanen dan permanen, dinding ada yang dari beton dan bahan kayu, sedangkan lantai dari keramik dan semen cor. Pada beberapa rumah ventilasi sangat kurang sehingga di dalam rumah agak gelap dan terasa lembab. Kepemilikan asset dan sarana penunjang hidup seperti perlatan masak, sarana istirahat, sarana transportasi, hiburan rata-rata tersedia di setiap rumah tangga. Dari gambaran di atas, rumah tangga penerima program faktanya tidak termasuk kategori miskin yang layak dibantu, namun mereka mendapatkan bantuan.

b. Rumah tangga yang mendapat bantuan pemberdayaan manusia dalam bentuk paket pendidikan dan paket sembilan bahan pokok berpendapat bahwa jumlah bantuan tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Disamping jumlah, jenis bantuan yang diperoleh, dari informasi pada Boks 1 diketahui bahwa penerima bantuan umumnya tidak turut serta secara aktif untuk pengambilan keputusan penerima bantuan termasuk penentuan jumlah dan jenis bantuan, namun semua menyatakan bahwa bantuan membantu mengurangi beban mereka. Tampak bahwa kelompok miskin masih menjadi obyek dan partisipasi hanya muncul saat bantuan mereka terima, partisipasi di tahap perencanaan sama sekali tidak terlihat dan kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran tidak terpenuhi padahal secara konseptual hasil-hasil program mestinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata kelompok sasaran apabila ada ruang partisipasi bagi masyarakat.

### **Konteks Pemberdayaan Usaha**

Salah satu pendekatan Tridaya Program Gerbangmas Taskin adalah pemberdayaan usaha atau ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan usaha ekonomi

produktif dan meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga miskin berpotensi serta memperkuat UPK sebagai lembaga keuangan atau lembaga usaha.

Sasaran kegiatan pemberdayaan usaha adalah rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengembangkan usaha atau Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah total RTM di Kota Banjarbaru sebanyak 3.748 rumah tangga. Dari jumlah tersebut 1.615 (34,80%) rumah tangga merupakan rumah tangga yang kepala keluarganya perempuan yang harus mencari nafkah karena beberapa hal seperti janda, suaminya sakit atau suami berada di tempat yang cukup jauh dan lain-lain. Dari seluruh RTM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu, RTM Berpotensi dengan jumlah 2.095 (55,89 %) yang akan mendapat bantuan pinjaman modal usaha dan RTM Rentan dengan jumlah 1.655 (44,15%) akan mendapatkan bantuan pemberdayaan manusia.

Sejak 2007, pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha agar mereka mampu mengembangkan usahanya. Besar dana pinjaman berkisar antara Rp 500.000,- sampai Rp 2000.000,-. Dengan konsep dana bergulir, maka dana yang dipinjam harus dikembalikan dengan cara diangsur. Di Kota Banjarbaru angsuran dilakukan selama 10 bulan, ditambah bunga pinjaman 1%. Mengapa pengembalian dilakukan selama 10 bulan, menurut pengurus UPK lebih disebabkan karena kemudahan dalam perhitungan bagi pengelola program juga bagi si peminjam. Sebagai ilustrasi, pinjaman modal usaha dengan besar Rp 1.000.000,-, maka angsuran setiap bulannya Rp 110.000,- (Rp 100.000,- pokok, Rp 10.000,- adalah jasa pinjaman).

Berdasarkan fakta dilapangan, pengelolaan dana program oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) tampaknya merujuk pada konsep pengelolaan keuangan mikro (microfinance) yang pada dasarnya memberikan bantuan modal berskala kecil bagi rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha mereka. Pada awal program tahun 2007, disalurkan dana untuk pinjaman kelompok masyarakat sebesar Rp 134.064.000,-, sedangkan tahun 2008 dana yang disalurkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 198.864.000,-. Untuk dua tahun terakhir dana pemberdayaan usaha, khususnya tahun 2009 jumlahnya meningkat hampir 300% yaitu sebesar Rp 584.000.000,- dan 2010 sebesar Rp 68.000.000,-. Total dana program selama empat tahun pelaksanaan pemberdayaan usaha di Kota Banjarbaru hampir mencapai Rp 1 Milyar (Rp 984.928.000,-).

Hingga tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin berpotensi yang telah menerima manfaat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif mencapai jumlah 795 rumah tangga dan yang belum dapat dilayani atau termasuk daftar tunggu sebesar 1.384 rumah tangga. Daftar tunggu ini adalah kelompok sasaran program yang belum mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha karena keterbatasan dana. Dengan asumsi bahwa 1 rumah tangga 3 orang, maka yang memperoleh manfaat diperkirakan sebanyak 2.385 jiwa seperti tabel dibawah ini

Realisasi Penggunaan Dana Pemberdayaan Usaha Program  
Gerbangmas Taskin Kota Banjarbaru Per Kecamatan Tahun 2017-  
2018

Kecamatan	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5
Cempaka	134.064.000	134.064.000	100%	Sharing
Landasan Ulin	134.064.000	134.064.000	100%	Sharing
Banjarbaru Kota	58.320.000	58.320.000	100%	Sharing
Landasan Ulin	58.320.000	58.320.000	100%	Sharing
Jumlah	384.768.000	384.768.000	100%	

Sumber : *Diolah Dari Laporan BPMKB Kota Banjarbaru, 2019*

### Pembahasan Penelitian

Penilaian Program Gerbangmas Taskin dilakukan dengan melihat kesesuaian antara beberapa tolok ukur keberhasilan yang telah ditentukan berdasarkan pedoman dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam implementasi program di wilayah Kota Banjarbaru. Penilaian ini merujuk pada model kesesuaian tiga arah (three ways fit model) yang diungkapkan Korten (1988), bahwa sebuah program dinilai efektif atau tidak dalam memajukan suatu kelompok sasaran, sangat tergantung pada kualitas derajat kesesuaian antara kebutuhan-kebutuhan penerima dengan tujuan maupun hasil program, kesesuaian antara persyaratan pelaksanaan program dengan kemampuan nyata pengelola program dan kesesuaian penerima bantuan dengan organisasi pelaksana.

Efektifitas program dinilai dengan pendekatan masukan (input), proses (process), keluaran (output) sampai dampak (impact) program, maka manakala fakta di lapangan cenderung memiliki kesesuaian, maka program tersebut dapat dinilai efektif, namun sebaliknya apabila tahap implementasi ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan baku, maka program dapat dinilai tidak efektif.

Berdasarkan pendekatan masukan, proses, keluaran, penilaian dilakukan dengan merujuk pada beberapa tolok ukur yaitu, pertama, aspek masukan (input) meliputi beberapa hal, yaitu jumlah desa/kelurahan penerima program, dana penyertaan dan pendamping, RTM penerima manfaat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, RTM perempuan dan tenaga pendamping. Kedua, aspek proses, meliputi beberapa hal saja yaitu, pelaksanaan sosialisasi desa/kelurahan, kegiatan perencanaan, penulisan usulan desa, pelaksanaan kegiatan Tridaya, dan pendampingan. Ketiga, aspek keluaran meliputi, pemahaman program, kejelasan dan ketepatan sasaran program, usulan desa, realisasi usulan desa, pencairan yang tepat waktu dan jumlah.

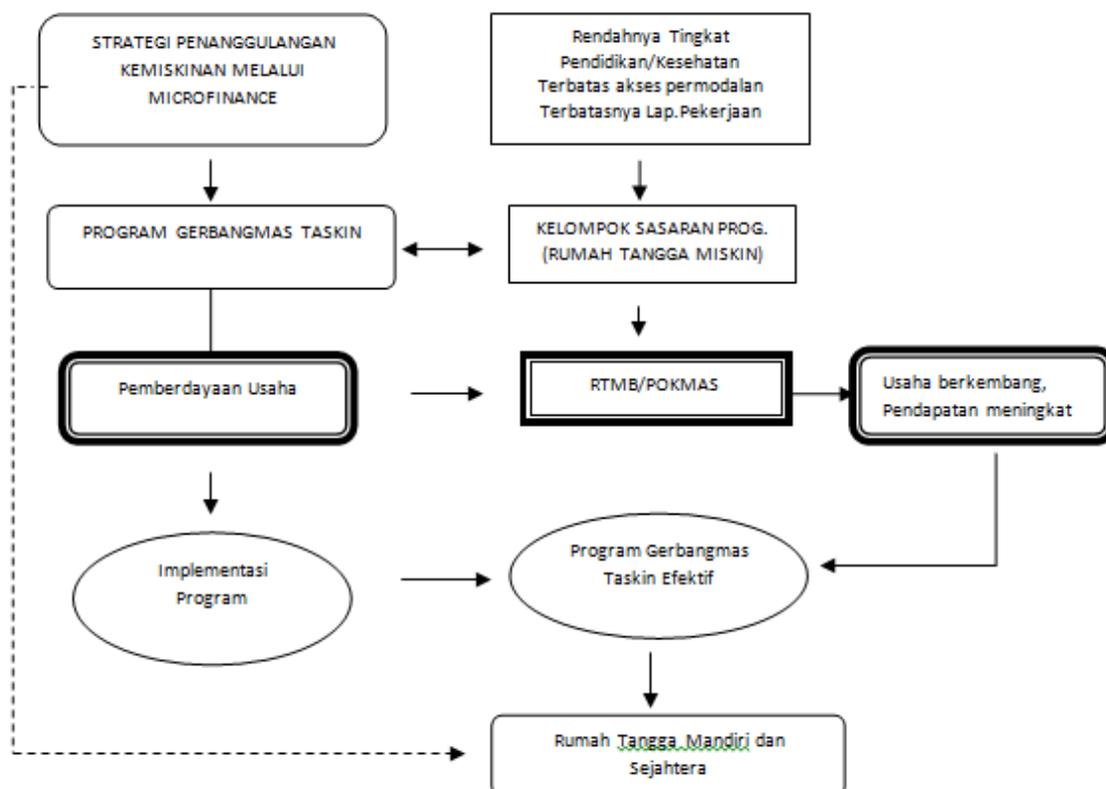
Dampak yang tolok ukur keberhasilan atau efektifitas program Gerbangmas Taskin meliputi beberapa hal yaitu, peningkatan kualitas hidup, peningkatan sarana/prasarana desa, perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan RTM, pengembangan usaha masyarakat kelurahan, budaya pembangunan partisipatif dan kinerja aparatur pengelola program meningkat.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, secara umum Program Gerbangmas Taskin di Kota Banjarbaru dapat terlaksana meskipun dijumpai kenyataan bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan tolok ukur atau indikator keberhasilan program, program mencapai hasil yang positif, di antaranya adalah dana yang dikelola UPK jumlahnya bertambah, Misalnya pada kasus Kelurahan Guntung Payung yang mengalami perkembangan dana sebesar Rp 5.436.125,- atau sekitar 7 % dari total Rp 77.616.125,- dana yang dikelola. Pada UPK lainnya secara umum juga mengalami perkembangan, meskipun jumlahnya tidak besar. Fakta lain dijumpai bahwa penerima program mampu mengembangkan usaha karena adanya bantuan modal, dan lainnya berpendapat sebaliknya bahwa bantuan tidak cukup untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Tolok ukur peningkatan pendapatan yang menjadi sasaran program, fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa penerima program yang memang memenuhi criteria dapat bantuan merasakan pendapatan mereka meningkat 5-10 % setiap harinya, sementara lainnya mengakui bahwa bantuan tidak memberikan pengaruh pada penghasilan mereka, bahkan bantuan menjadi beban mereka.

### **Prospek Program Gerbangmas Taskin**

Program Gerbangmas Taskin dengan pendekatan Tridaya, merupakan salah satu model pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini bercirikan sederhana dan berskala kecil, meningkatkan pendapatan, menyentuh kebutuhan langsung rakyat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Program Gerbangmas Taskin sejak tahun 2007 sampai 2010 berdasarkan fakta dilapangan diketahui menghadapi berbagai permasalahan seperti partisipasi masyarakat yang dinilai rendah, bantuan tidak tepat sasaran, ketidaklancaran pengembalian pinjaman dan pendampingan yang belum optimal menyebabkan sasaran dan tujuan program belum optimal tercapai. Disamping permasalahan, fakta di lapangan menunjukkan adanya keberhasilan program pada beberapa kasus seperti berkurangnya beban hidup rumah tangga miskin, kualitas lingkungan meningkat, perkembangan dana program, berkembangnya usaha sampai pada meningkatnya penghasilan rumah tangga miskin.

Model Pemberdayaan Usaha Program Gerbangmas Taskin alternatif pengentasan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :



Meskipun pelaksanaan program menghadapi permasalahan, pada kasus tertentu program menunjukkan adanya pencapaian sasaran. Untuk itu, Program Gerbangmas Taskin dianggap masih memiliki prospek yang baik dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sebuah model pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan untuk pengentasan kemiskinan. Belajar dari pengalaman Muhammad Yunus dalam mengembangkan program bantuan untuk orang miskin di Bangladesh dengan berpegang pada prinsip-prinsip microfinance yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga Grameen Bank, apabila Program Gerbangmas Taskin kedepannya akan dijadikan model pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhirnya mengurangi kemiskinan, maka alternatif perbaikan program adalah pendekatan program dirancang lebih fokus pada pendekatan pemberdayaan usaha atau ekonomi. Pendekatan Tridaya tampaknya ingin semua permasalahan orang miskin dapat diselesaikan, namun dalam implementasinya program dinilai asal terlaksana saja, sasaran dan tujuan tidak optimal dicapai dan lebih mengarah pada logika proyek sebagai kegiatan rutin semata. Merujuk pada konsep microfinance yang diakui sebagai metode yang tepat untuk pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin dalam pelaksanaannya mengarah pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan mikro seperti sasaran hanya orang miskin, keterlibatan wanita, penguatan lembaga dan hasil yang terukur.

Model program dengan penekanan atau fokus pada pemberdayaan usaha merupakan metode yang paling tepat diterapkan sebagaimana sebagaimana model yang dikembangkan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank nya. Lembaga UPK yang dinilai sehat dan kinerjanya baik, dapat diarahkan pada terbentuknya suatu lembaga keuangan desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tata kelolanya atau manajemen BUMDes dijalankan dengan menggunakan konsep microfinance sebagaimana yang dipakai oleh Grameen Bank dalam membantu masyarakat miskin yang memang betul-betul membutuhkan.

Program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan apabila dipandang sebagai suatu sistem, maka sasaran program yang fokus, pengelola program yang profesional, kelompok masyarakat dinamis dan peran pendamping dapat dijalankan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Apabila salah satu aspek program mengalami masalah, program tidak dapat mencapai sasarannya, namun apabila semua aspek program menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, niscaya program mencapai keberhasilan dan upaya pengentasan kemiskinan dapat dicapai.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru, dinilai sepenuhnya belum efektif dalam membantu pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Hal tersebut disebabkan karena partisipasi rumah tangga miskin (RTM) penerima program dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan kelompok miskin dinilai masih rendah. Pada beberapa kasus, dijumpai fakta bahwa rumah tangga yang mendapat bantuan menyatakan mereka tidak memiliki daya dan kesempatan ikut menentukan jenis dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Rumah tangga miskin masih menjadi obyek dan belum mampu berperan dalam menentukan keputusan yang menyangkut keinginan mereka.

Selain itu Penerima program bukan termasuk rumah tangga yang memenuhi kriteria rumah tangga sasaran (RTS) yaitu rumah tangga miskin (RTM) yang menerima subsidi langsung tunai sehingga sasaran program untuk membantu kelompok miskin mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya tidak dapat dicapai atau tidak tepat sasaran. Fakta ini menunjukkan bahwa Program Gerbangmas Taskin, belum menerapkan prinsip-prinsip microfinance yang salah satunya adalah bahwa bantuan hanya untuk orang miskin.

2. Rumah tangga miskin penerima program yang dinilai berhasil dan dapat memanfaatkan bantuan adalah rumah tangga miskin berpotensi yang memiliki usaha kecil dengan perputaran modal harian seperti usaha bengkel sepeda, warung makan dan minum, industry rumah tangga, kios makanan ringan, penjual sayuran keliling. Kelompok rumah tangga miskin yang berhasil ini merasakan adanya perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan 10-15% setiap harinya.

3. Faktor penentu keberhasilan pemberdayaan usaha Program Gerbangmas Taskin yaitu jenis usaha, status sosial ekonomi, kesadaran anggota dan keteladan ketua pokmas, kemampuan pengurus UPK dan adanya kepercayaan. Selain itu faktor penyebab belum efektifnya program adalah penerima program bukan rumah tangga miskin (bertentangan dengan prinsip microfinance), kurangnya pemahaman UPK terhadap program, partisipasi yang masih rendah, dan pendampingan yang tidak optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2019. Pedoman Umum Program Gerbangmas Taskin Tahun 2016-2019. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Banjarmasin
- Anonimous, 2019. Rekapitulasi Kegiatan Program Gerbangmas Taskin 2007-2010. BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin
- Anonimous, 2019. Profil dan Analisis Rumah Tangga Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan Kota Banjarbaru. Bappeda Bekerja sama dengan BPS Kota Banjarbaru
- Anonimous, 2019. Profile Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. LP3ES. Jakarta
- Conyers, Diana.1994. Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fatah, Luthfi. 2007. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pustaka Banua. Banjarbaru. Kalsel
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Khandker, Shahidur R. 1998. Fighting Poverty With Microcredit : Experience in Bangladesh.Oxford University Press, New York
- Korten, David C. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Narayan, Deepa. 2002. Measuring Empowerment. Cross-Diciplinary Perspectives. World Bank.
- Sarman, Mukhtar, 1998. Dimensi Kemiskinan. Agenda Pemikiran Sajogyo. Pusat P3R-YAE, Bogor
- Sarman, Mukhtar, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Fisip Unlam, Banjarmasin
- Sarman, Mukhtar , 2008. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis LERD. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Daerah & Program MSAP Universitas Lambung Mangkurat
- Sarman, Mukhtar dan Taufik Hidayat, 2010. Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Administrasi Pembangunan. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin
- Scott, James C. 2000.Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soetomo,2009. Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Supriatna, Tjahya, 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Humaniora Utama Press (HUP). Bandung
- Todaro, Michael P. 1995. Ekonomi Untuk Negara Berkembang. Bumi Aksara. Jakarta
- Yunus, Muhammad, 2008. Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta